BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden NomoR 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat 1 Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabpaten Halmahera Barat Nomor 06) ;

Memperhatikan : 1. Register Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2016;

2. Hasil Workshop Penghitungan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 Desember 2015 di Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan *prakarsa masyarakat, hak asal usul,* dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran *Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi* Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN, DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Pertama

Pembagian

Pasal 2

Pagu Dana Desa sebesar Rp. 101.717.600.000,- (seratus satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap desa sebesar Rp. 565.640.000,- (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016;
b. Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah peduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 3

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$W = [(0{,}25 \times Z1) + (0{,}35 \times Z2) + (0{,}10 \times Z3) + (0{,}30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas Wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten.

DD kab = pagu Dana Desa kabupaten
AD kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Bagian Ketiga
Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II
PENYALURAN

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (Dua puluh perseratus)

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati setelah di verifikasi oleh Camat.

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap II kepada Bupati setelah di verifikasi oleh Camat.

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).

c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati C.q Camat C.q Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat paling lambat minggu kedua bulan Juli.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 5

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

(1). Bidang Pembangunan, yang meliputi :

a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;

d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau;

e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

(2). Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi :

a. Peningkatan investasi ekonomi esa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

c. Bantuan peningkatan untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centte);

e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas engelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaaga medis/swamedikasi di Desa;

f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;

g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati C.q Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

(3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati C.q Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat setelah di verifikasi oleh Camat.

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati C.q Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 31 Maret 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem , Adm & Umum	
Inspektur	
Kepala BPKAD	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Ttd

DR. IR. H. ABJAN SOFYAN, MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016 N0M0R

LAMPIRAN : **PERATURAN BPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR : 4 Tahun 2016
TANGGAL : 31 Maret **2016**
TENTANG : **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	JAILOLO				
1		GUFASA	565,640,000.00	20,878,417.73	586,518,000.00
2		GUAEMAADU	565,640,000.00	26,212,246.18	591,852,000.00
3		JALAN BARU	565,640,000.00	70,607,142.20	636,247,000.00
4		GAM LAMO	565,640,000.00	26,912,633.30	592,553,000.00
5		SOAKONORA	565,640,000.00	46,075,072.94	611,715,000.00
6		GALALA	565,640,000.00	31,017,001.54	596,657,000.00
7		BOBANEHENA	565,640,000.00	43,338,352.05	608,978,000.00
8		PAYO	565,640,000.00	21,263,933.81	586,904,000.00
9		BOBO	565,640,000.00	27,296,718.03	592,937,000.00
10		SARIA	565,640,000.00	19,406,795.77	585,047,000.00
11		IDAM DEHE	565,640,000.00	14,658,593.02	580,299,000.00
12		IDAMDEHE GAMSUNGI	565,640,000.00	15,074,496.20	580,714,000.00
13		MARMABATI	565,640,000.00	19,770,326.69	585,410,000.00
14		GAMTALA	565,640,000.00	18,023,132.55	583,663,000.00
15		LOLORI	565,640,000.00	17,931,123.46	583,571,000.00
16		TOBOSO	565,640,000.00	22,266,734.06	587,907,000.00
17		HOKU-HOKU KIE	565,640,000.00	29,409,561.54	595,050,000.00
18		ACANGO	565,640,000.00	14,010,184.81	579,650,000.00
19		TEDENG	565,640,000.00	62,504,313.09	628,144,000.00
20		AKEDIRI	565,640,000.00	31,971,724.65	597,612,000.00
21		PORNITI	565,640,000.00	55,961,464.31	621,601,000.00
22		BUKU MATITI	565,640,000.00	39,946,901.09	605,587,000.00
23		TODOWONGI	565,640,000.00	34,437,565.97	600,078,000.00
24		TUADA	565,640,000.00	29,993,001.27	595,633,000.00
25		MATUI	565,640,000.00	28,827,678.55	594,468,000.00
26		BUKU BUALAWA	565,640,000.00	22,813,145.41	588,453,000.00
27		TAURO	565,640,000.00	75,359,034.05	640,999,000.00
28		HATE BICARA	565,640,000.00	28,941,056.64	594,581,000.00
29		GUARIA	565,640,000.00	31,645,456.58	597,285,000.00
30		PATENG	565,640,000.00	31,306,865.86	596,947,000.00
31		BOBO JIKO	565,640,000.00	17,188,434.56	582,828,000.00
32		ULO	565,640,000.00	17,743,093.73	583,383,000.00
33		KURIPASAI	565,640,000.00	21,860,853.33	587,501,000.00
34		BUKU MAADU	565,640,000.00	21,449,249.66	587,089,000.00

II	LOLODA				
35		KEDI	565,640,000.00	47,115,636.56	612,756,000.00
36		SOASIO	565,640,000.00	28,657,519.59	594,298,000.00
37		TOTALA	565,640,000.00	27,123,195.06	592,763,000.00
38		TOLOFUO	565,640,000.00	30,318,333.92	595,958,000.00
39		TUGUIS	565,640,000.00	30,491,507.00	596,132,000.00
40		TASYE	565,640,000.00	77,432,306.70	643,072,000.00
41		LABA BESAR	565,640,000.00	40,818,365.22	606,458,000.00
42		LABA KECIL	565,640,000.00	29,232,816.99	594,873,000.00
43		JANO	565,640,000.00	29,983,074.12	595,623,000.00
44		BAKUN	565,640,000.00	41,318,951.90	606,959,000.00
45		BUO	565,640,000.00	54,632,753.01	620,273,000.00
46		BAKUN PANTAI	565,640,000.00	37,170,007.51	602,810,000.00
47		BARATAKU	565,640,000.00	62,992,807.69	628,633,000.00
48		GAM KAHE	565,640,000.00	52,708,987.62	618,349,000.00
49		PUMADADA	565,640,000.00	58,729,442.60	624,369,000.00
50		BAJA	565,640,000.00	82,205,311.21	647,845,000.00
51		TUAKARA	565,640,000.00	75,612,099.70	641,252,000.00
52		KAHATOLA	565,640,000.00	58,419,115.70	624,059,000.00
53		BOSALA	565,640,000.00	29,928,119.73	595,568,000.00
54		SALU	565,640,000.00	34,067,724.77	599,708,000.00
55		TOSOMOLO	565,640,000.00	41,463,877.09	607,104,000.00
56		JANGAILULU	565,640,000.00	27,763,308.83	593,403,000.00
57		BANTOLI	565,640,000.00	75,828,551.70	641,469,000.00
58		LINGGUA	565,640,000.00	26,482,248.57	592,122,000.00
59		TOMODO	565,640,000.00	33,445,286.83	599,085,000.00
60		TOTALA JAYA	565,640,000.00	19,569,789.09	585,210,000.00
61		BILOTE	565,640,000.00	31,407,770.35	597,048,000.00
62		ARUKU	565,640,000.00	28,938,729.20	594,579,000.00
III	IBU				
63		TOGOLA WAYOLI	565,640,000.00	16,358,564.99	581,999,000.00
64		TOGOLA SANGIR	565,640,000.00	27,357,712.83	592,998,000.00
65		TAHAFO	565,640,000.00	18,314,731.28	583,955,000.00
66		TONGUTE TERNATE	565,640,000.00	22,573,884.96	588,214,000.00
67		AKESIBU	565,640,000.00	29,839,280.83	595,479,000.00
68		MARITANGO	565,640,000.00	21,470,379.91	587,110,000.00
69		KIE ICI	565,640,000.00	40,271,373.27	605,911,000.00
70		TONGUTE GOIN	565,640,000.00	27,139,048.66	592,779,000.00
71		TUNGUTE SUNGI	565,640,000.00	26,924,563.81	592,565,000.00
72		GAM ICI	565,640,000.00	22,429,577.40	588,070,000.00
73		TOBAOL	565,640,000.00	36,852,232.32	602,492,000.00
74		GAMLAMO	565,640,000.00	26,546,380.91	592,186,000.00
75		NAGA	565,640,000.00	21,570,425.57	587,210,000.00
76		SOANA MASUNGI	565,640,000.00	26,926,898.14	592,567,000.00
77		TONGUTE TERNATE ASAL	565,640,000.00	10,413,909.88	576,054,000.00
78		AKE BOSO	565,640,000.00	19,912,385.20	585,552,000.00
79		KAMPUNG BARU	565,640,000.00	14,595,860.80	580,236,000.00

IV	SAHU				
80		SUSUPU	565,640,000.00	30,325,012.68	595,965,000.00
81		LAKO AKELAMO	565,640,000.00	13,710,276.73	579,350,000.00
82		TARUBA	565,640,000.00	15,812,439.15	581,452,000.00
83		TODAHE	565,640,000.00	35,388,112.08	601,028,000.00
84		PEOT	565,640,000.00	26,920,869.66	592,561,000.00
85		SASUR	565,640,000.00	51,001,394.80	616,641,000.00
86		GORO GORO	565,640,000.00	54,177,865.05	619,818,000.00
87		TACIM	565,640,000.00	19,058,796.61	584,699,000.00
88		BALISOANG	565,640,000.00	24,109,615.75	589,750,000.00
89		WORAT-WORAT	565,640,000.00	15,565,443.20	581,205,000.00
90		TACICI	565,640,000.00	15,229,154.74	580,869,000.00
91		TARAUDU	565,640,000.00	19,321,221.51	584,961,000.00
92		GOLO	565,640,000.00	21,497,597.16	587,138,000.00
93		LAKO AKEDIRI	565,640,000.00	21,034,393.80	586,674,000.00
94		JARA KORE	565,640,000.00	17,199,593.14	582,840,000.00
95		ROPU TENGAH BALU	565,640,000.00	23,597,917.54	589,238,000.00
96		DERE	565,640,000.00	26,624,902.65	592,265,000.00
97		BALISOAN UTARA	565,640,000.00	23,097,635.62	588,738,000.00
98		SASUR PANTAI	565,640,000.00	33,623,874.87	599,264,000.00
V	JAILOLO SELATAN				
99		SIDANGOLI GAM	565,640,000.00	42,449,518.15	608,090,000.00
100		SIDONGOLI DEHE	565,640,000.00	49,589,117.35	615,229,000.00
101		DOMATO	565,640,000.00	31,724,652.56	597,365,000.00
102		TATALEKA	565,640,000.00	21,746,340.49	587,386,000.00
103		GAMLENGE	565,640,000.00	18,823,332.20	584,463,000.00
104		AKEJAILOLO	565,640,000.00	23,558,727.44	589,199,000.00
105		BIAMAAHI	565,640,000.00	35,202,662.28	600,843,000.00
106		TUGURACI	565,640,000.00	27,125,906.42	592,766,000.00
107		AKEARA	565,640,000.00	54,206,753.64	619,847,000.00
108		AKELAHA	565,640,000.00	23,715,688.82	589,356,000.00
109		DODINGA	565,640,000.00	34,720,539.15	600,361,000.00
110		TEWE	565,640,000.00	27,997,385.18	593,637,000.00
111		TONIKU	565,640,000.00	30,733,450.83	596,373,000.00
112		RIORIBATI	565,640,000.00	29,123,945.32	594,764,000.00
113		TABA DAMAI	565,640,000.00	25,796,303.18	591,436,000.00
114		MOISO	565,640,000.00	27,980,768.46	593,621,000.00
115		BRAHA	565,640,000.00	22,526,359.98	588,166,000.00
116		BANGKIT RAHMAT	565,640,000.00	30,084,789.92	595,725,000.00
117		BOBANE DANO	565,640,000.00	15,947,301.33	581,587,000.00
118		SUKA DAMAI	565,640,000.00	25,247,193.45	590,887,000.00
119		HIJRAH	565,640,000.00	25,173,923.89	590,814,000.00
120		RATEM	565,640,000.00	13,102,807.21	578,743,000.00
VI	TABARU				
121		PODOL	565,640,000.00	38,138,729.28	603,779,000.00
122		TENGOWANGO	565,640,000.00	23,139,271.31	588,779,000.00
123		TOGOWO	565,640,000.00	32,101,723.26	597,742,000.00
124		DUONO	565,640,000.00	61,011,610.82	626,652,000.00
125		GOIN	565,640,000.00	30,986,592.59	596,627,000.00
126		SANGAJI NYEKU	565,640,000.00	30,170,272.65	595,810,000.00
127		TUGUIS	565,640,000.00	67,706,293.50	633,346,000.00
128		TOGOREBA SUNGI	565,640,000.00	13,482,040.19	579,122,000.00
129		BORONA	565,640,000.00	15,095,774.22	580,736,000.00
130		TODOKE	565,640,000.00	26,328,145.57	591,968,000.00
131		TOLISAOR	565,640,000.00	34,545,968.00	600,186,000.00
132		PASALULU	565,640,000.00	45,688,096.16	611,328,000.00
133		TOGOREBA TUA	565,640,000.00	84,096,047.39	649,736,000.00
134		TUKUOKU	565,640,000.00	21,888,958.71	587,529,000.00
135		SOASANGAJI	565,640,000.00	23,183,671.58	588,824,000.00
136		ARU JAYA	565,640,000.00	40,429,988.21	606,070,000.00

VII	IBU SELATAN				
137		TOSOA	565,640,000.00	52,003,451.51	617,643,000.00
138		TOBOBOL	565,640,000.00	49,119,920.32	614,760,000.00
139		BARU	565,640,000.00	63,313,672.91	628,954,000.00
140		NANAS	565,640,000.00	49,057,242.07	614,697,000.00
141		JERE	565,640,000.00	42,953,107.67	608,593,000.00
142		GAMSUNGI	565,640,000.00	47,011,694.64	612,652,000.00
143		BATAKA	565,640,000.00	99,562,519.92	665,203,000.00
144		TALAGA	565,640,000.00	46,601,406.50	612,241,000.00
145		TOBELOS	565,640,000.00	38,544,733.89	604,185,000.00
146		GAMKONORA	565,640,000.00	41,490,344.05	607,130,000.00
147		SARAU	565,640,000.00	31,211,141.33	596,851,000.00
148		NGAWET	565,640,000.00	41,553,795.08	607,194,000.00
149		ADU	565,640,000.00	57,640,962.93	623,281,000.00
150		GAMSIDA	565,640,000.00	76,466,420.46	642,106,000.00
151		NGALO NGALO	565,640,000.00	55,111,670.64	620,752,000.00
152		TUGUAER	565,640,000.00	68,873,945.43	634,514,000.00
VIII	SAHU TIMUR				
153		LOCE	565,640,000.00	17,607,379.51	583,247,000.00
154		IDAM GAMLAMO	565,640,000.00	14,199,531.87	579,840,000.00
155		GAMOMENG	565,640,000.00	20,284,240.03	585,924,000.00
156		AKELAMO	565,640,000.00	30,317,383.81	595,957,000.00
157		TARAUDU KUSU	565,640,000.00	23,012,520.28	588,653,000.00
158		AWER	565,640,000.00	21,061,213.20	586,701,000.00
159		AKETOLA	565,640,000.00	16,862,538.17	582,503,000.00
160		TIBOBO	565,640,000.00	18,566,073.43	584,206,000.00
161		HOKU- HOKU GAM	565,640,000.00	15,644,005.22	581,284,000.00
162		GAMNYIAL	565,640,000.00	20,433,154.83	586,073,000.00
163		GOLAGO KUSUMA	565,640,000.00	11,929,521.00	577,570,000.00
164		NGAON	565,640,000.00	16,103,502.30	581,744,000.00
165		GAMSUNGI	565,640,000.00	13,023,611.92	578,664,000.00
166		TABA CAMPAKA	565,640,000.00	15,232,335.84	580,872,000.00
167		CAMPAKA	565,640,000.00	15,380,134.57	581,020,000.00
168		GOAL	565,640,000.00	23,999,171.71	589,639,000.00
169		SIDODADI	565,640,000.00	17,010,244.82	582,650,000.00
170		AIR PANAS	565,640,000.00	16,293,487.06	581,933,000.00
	JUMLAH TOTAL		96,158,800,000.00	5,558,800,000.00	101,717,600,000.00

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pmth.Adm&Umum	
Kepala BPKAD	
Inspektorat	
Kepala BPMD	
Kabag Hukum&Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY